

Siaran Pers
Kebijakan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)
untuk Perlindungan Kesehatan Publik di Indonesia

Jakarta, 18 Mei 2022 – Dalam rangka memperingati Hari Hipertensi Sedunia tahun 2022, Aliansi PTM Indonesia bersama koalisi masyarakat menyampaikan tuntutan akan pentingnya kehadiran kebijakan pengendalian penyakit tidak menular (PTM) melalui konferensi pers ***Pengendalian Faktor Risiko PTM untuk Indonesia yang Lebih Sehat.***

Setidaknya dalam satu dekade terakhir penyakit tidak menular menjadi penyebab kematian terbesar penduduk dunia menggantikan penyakit infeksi. Tingginya prevalensi penyakit tidak menular juga turut membebani ekonomi negara-negara dan menghambat pembangunan.

Karena sifatnya yang kronis atau menahun dan tidak memberikan dampak kesehatan seketika, umumnya masyarakat tidak sadar bahwa perilaku mereka berisiko pada penyakit tidak menular (PTM). Misalnya, konsumsi makanan dan minuman dengan kandungan gula, garam, dan lemak yang tinggi, konsumsi rokok, asupan sayur dan buah yang rendah, serta tidak berolahraga. Perilaku ini berkontribusi pada penyakit tidak menular.

Di Indonesia, prevalensi obesitas pada kelompok dewasa, misalnya, meningkat dua kali lipat dalam kurun waktu satu dekade terakhir, dari 10,50 persen pada 2007 menjadi 21,80 persen pada 2018 (Riset Kesehatan Dasar/Riskesdas). Sedangkan prevalensi obesitas pada anak usia 5–12 tahun mencapai 18,8% dan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat obesitas pada anak tertinggi di wilayah ASEAN (WHO). Kemudian angka kesakitan akibat diabetes juga berdampak luas. Sebanyak 19,5 juta orang penduduk Indonesia merupakan penderita diabetes yang seumur hidupnya harus menjalani pengobatan dengan biaya yang tidak sedikit. Negara setidaknya harus menanggung sebesar Rp 21,2 triliun untuk membiayai terapi penyakit ini (IDF Diabetes Atlas). Diabetes merupakan penyebab kematian tertinggi nomor 3 di Indonesia.

"Akses pelayanan diabetes dan penyakit tidak menular lainnya yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat akan memberikan kepastian bagi penyintas PTM untuk menjalani hidup yang terbaik bersama penyakit yang dimilikinya," tutur **Anita Sabidi, anggota Persatuan Diabetes Indonesia (Persadia) dan Ikatan Diabetes Anak dan Remaja (Ikadar).**

Selain itu, sekitar 52,7 persen penduduk Indonesia mengonsumsi natrium >2000 mg/hari atau melebihi batas yang dianjurkan. Rata-rata asupan natrium penduduk Indonesia mencapai 2.764 mg/orang/hari. Sebanyak 73 persen natrium yang dikonsumsi berasal dari makanan yang dimasak di rumah dan 23 persen dari makanan yang dibeli di luar rumah.

Karena itu, tidak mengherankan apabila Riskesdas 2018 menunjukkan, prevalensi hipertensi pada penduduk dewasa di Indonesia 34,11 persen atau naik dari sebelumnya 25,8 persen tahun 2013. Kondisi ini pada akhirnya dapat memicu komplikasi kesehatan yang lebih buruk. Kondisi itu diperburuk oleh prevalensi konsumsi rokok penduduk di atas 15 tahun di Tanah Air yang mencapai 66 persen dan prevalensi perokok pada kelompok umur 10-14 tahun yang sebesar 3,5 persen (Tobacco Atlas).

Dr. dra. Rita Damayanti, MSPH sebagai Ketua Bidang Edukasi Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Komnas PT menyampaikan, “Untuk mencegah penyakit tidak menular, tidak ada cara lain selain dengan menghindari faktor risikonya. Upaya ini tidak cukup hanya dengan promosi dan edukasi kesehatan saja, harus ada kebijakan yang secara komprehensif yang mengatur.”

Itu sebabnya, menghindari faktor risiko penyakit tidak menular perlu intervensi kebijakan pemerintah yang lebih tegas. Instrumen pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular melalui kebijakan berbasis bukti menjadi wujud hadirnya negara untuk menjamin hak kesehatan warganya.

Salah satu instrumen pengendalian faktor risiko yang efektif, terutama untuk konsumsi makanan dan minuman berpemanis serta rokok, adalah cukai. Instrumen fiskal ini diyakini efektif menurunkan konsumsi gula berlebih dan konsumsi rokok. Di saat yang sama, hasil cukai yang terkumpul bisa menjadi sumber tambahan pembiayaan kesehatan pemerintah.

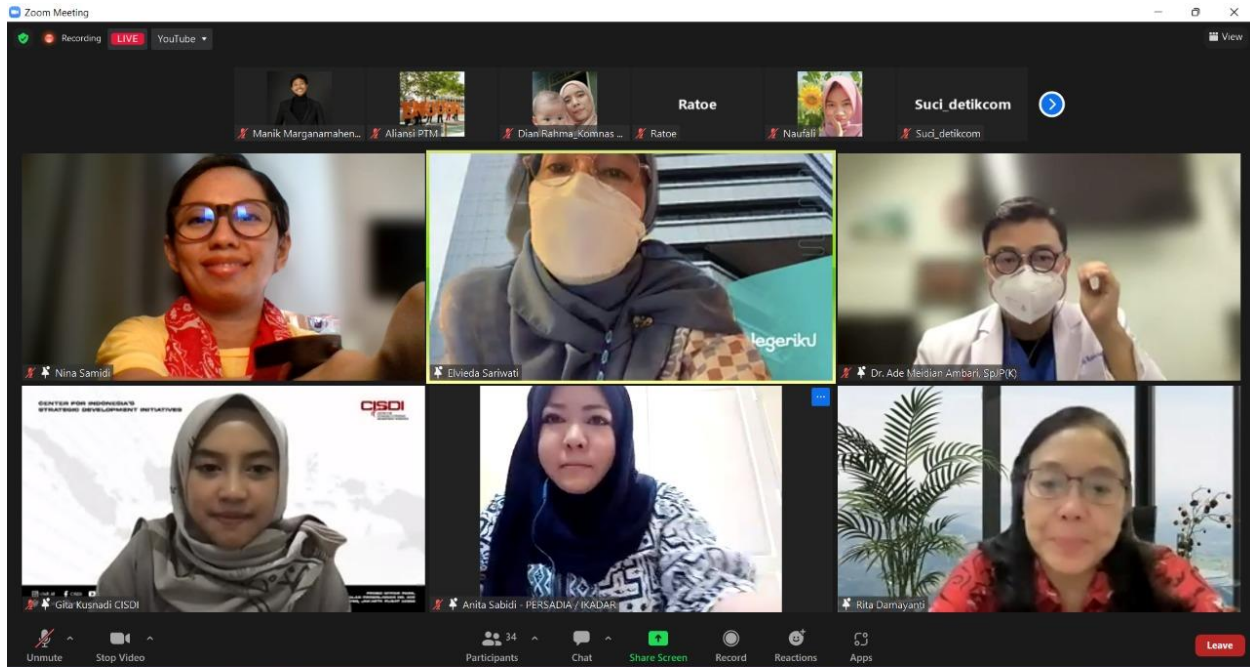
Gita Kusnadi selaku Plt. Manajer Riset CISDI mengungkapkan kebijakan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) adalah bagian dari upaya pencegahan PTM yang komprehensif. “Cukai MBDK menjadi pilihan intervensi yang efektif untuk mentransformasi pola konsumsi masyarakat. Kebijakan ini harus diterapkan pada semua produk MBDK tanpa kecuali dan secara serentak. Kehadiran kebijakan cukai MBDK memberikan manfaat bagi aspek kesehatan dan kualitas sumber daya manusia di masa depan” tuturnya.

“Pemerintah saat ini sedang mengusahakan untuk memperkuat peraturan pencegahan dan pengendalian konsumsi zat adiktif melalui revisi PP 109 tahun 2022. Kemenkes melalui P2PTM juga menginisiasi untuk mulai melakukan pengaturan terhadap cukai MBDK melalui bersurat kepada Kemenkeu agar kebijakan ini bisa segera dilaksanakan. Namun, upaya ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh Kementerian Kesehatan, harus bersama K/L yang terkait lainnya.” papar **dr. Elvieda Sariwati, M.Epid selaku Plt Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes RI.**

Memfaatkan momentum Hari Hipertensi Sedunia yang jatuh setiap 17 Mei, Aliansi Penyakit Tidak Menular mendukung pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang lebih tegas dan jelas dalam mengendalikan faktor risiko PTM.

"Indonesia punya peran penting memberikan contoh baik dalam pengendalian penyakit di kancah global. Peran ini dapat dimulai dengan kebijakan pengendalian faktor risiko PTM seperti menerapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dan segera menyelesaikan revisi PP 109/ 2012 dalam pengendalian produk zat adiktif tembakau. Kebijakan ini adalah bentuk komitmen dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan publik. Aliansi PTM Indonesia siap mendukung pengendalian faktor risiko PTM untuk pembangunan kesehatan Indonesia yang lebih baik," tutur **dr. Ade Meidian Ambari, Sekretaris Umum Aliansi PTM.**

Keterangan Foto:



18 Mei 2022 – Para narasumber dan moderator dalam konferensi pers Aliansi PTM Indonesia (dari kiri ke kanan). Atas: Nina Samidi sebagai moderator kegiatan, dr. Elvieda Sariwati, M.Epid; dr. Ade Meidian Ambari, Sp.Jp. Bawah: Gita Kusnadi; Anita Sabidi; Dr. dra. Rita Damayanti, MSPH.



18 Mei 2022 - Sekretaris Umum Aliansi PTM Indonesia, dr. Ade Meidian Ambari, Sp.Jp memaparkan bahwa Indonesia punya peran penting memberikan contoh baik dalam pengendalian penyakit di kancah global. Peran ini dapat dimulai dengan kebijakan pengendalian faktor risiko PTM seperti penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dan penyelesaian revisi PP 109/ 2012 dalampengendalian produk zat adiktif tembakau. "Kebijakan pengendalian PTM dan faktor risikonya adalah bentuk komitmen dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan publik." ungkapnya.



18 Mei 2022 - Pelaksana Tugas Manajer Riset CISDI, Gita Kusnadimengungkapkan bahwa ebijakan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) adalah bagian dari upaya pencegahan PTM yang komprehensif. Cukai MBDK menjadi pilihan intervensi yangefektif untuk mentransformasi pola konsumsi masyarakat. Kebijakan ini harus diterapkan pada semuaproduk MBDK tanpa kecuali dan secara serentak. Kehadiran kebijakan cukai MBDK memberikan manfaat bagi aspek kesehatandan kualitas sumber daya manusia di masa depan.



18 Mei 2022 - Dr. dra. Rita Damayanti, MSPH sebagai Ketua Bidang Edukasi Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Komnas PT menyampaikan untuk mencegah penyakit tidak cukup hanya dengan promosi dan edukasi kesehatan mengingat terbatasnya literasi kesehatan masyarakat, kebijakan pengendalian yang belum optimal, dan gencarnya promosi industri produk tidak sehat.

Tentang Aliansi PTM Indonesia

Aliansi PTM Indonesia didirikan pada 2010, beranggotakan 23 organisasi profesi kesehatan dan lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Indonesia. Aliansi PTM Indonesia merupakan badan koordinasi dari organisasi anggota dalam mengampanyekan pengendalian faktor risiko dan penyakit tidak menular di Indonesia yang sesuai dengan visi dan misi organisasi masing-masing.

Aliansi PTM Indonesia memiliki visi untuk aktif berperan dalam menurunkan prevalensi penyakit tidak menular dan komplikasinya melalui upaya promosi dan pencegahan, deteksi dini, upaya kuratif yang efisien dan efektif, serta rehabilitasi.

Email : aliansi.ptm@gmail.com

Website : www.aliansiptm.org